

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bayu Seto H., 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Junita Sitorus, 2004, *Perkawinan Campuran Dalam Hukum di Indonesia*, Pintu Gerbang, Jakarta.
- Mulyadi, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang- Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, 1997, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Alumni, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Zain Badjeber, 1985, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Universal Declaration of Human Right 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

United Nations Convention on the Rights of the Child 1989.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeroleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memeroleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

C. WEBSITE

<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 1 September 2017, Pkl. 22.00 WIB.

<http://www.percaindonesia.com>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, Pkl. 21.00 WIB.